

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis merupakan permasalahan atau fenomena yang sering terjadi di dalam organisasi maupun perusahaan. Menurut Linke (1989) krisis merupakan hal negatif yang dapat mengganggu keberlangsungan dalam sebuah organisasi. Menurutnya, krisis dapat berakibat pada kematian, menurunnya kualitas kehidupan, berkurangnya tingkat kesejahteraan dan menurunnya citra perusahaan. Krisis biasanya dianggap sebagai suatu keadaan atau kejadian yang memiliki dampak merugikan yang lebih besar bagi organisasi. Davlin dikutip Kriyantono (2012), menyatakan bahwa "situasi yang tidak stabil dengan berbagai kemungkinan dapat menimbulkan hasil yang tidak diinginkan." Jika organisasi mengalami situasi krisis, maka prosedur normal tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Organisasi akan mengalami situasi yang berbeda yang menyebabkan beberapa hal berubah. Situasi seperti ini jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat akan memberikan dampak negatif bagi organisasi.

Krisis tidak hanya terjadi di dalam organisasi maupun perusahaan, melainkan dapat terjadi di dunia politik. Hubungan masyarakat dan komunikasi politik memiliki keterkaitan terhadap komunikasi krisis. Humas politik dapat didefinisikan sebagai "proses di mana seorang aktor untuk tujuan politik melalui komunikasi politik, komunikasi dan tindakan yang berusaha mempengaruhi, membangun, dan memelihara hubungan dan reputasi yang menguntungkan dengan publik dan pemangku kepentingan utama untuk membantu mendukung misinya dan mencapai tujuannya" (Strömbäck & Kioussis, 2011). Perusahaan harus memanfaatkan keahlian individu-individu yang tepat dari berbagai bidang untuk merencanakan dan mengelola situasi krisis (Darling, 1994)

Dalam setiap perusahaan, lembaga maupun organisasi diperlukan seorang Humas untuk membuat citra baik dan mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi baik kepada publik, klien ataupun para investor. Humas dalam instansi menjadi ujung tombak yang memiliki peran penting dalam menangani permasalahan baik dari pihak internal maupun eksternal. Menurut Ruslan (Ruslan, 2007) menyatakan bahwa keberhasilan seorang humas dapat dilihat dari sukses atau tidaknya visi misi dalam sebuah instansi. Menghadapi sebuah krisis di dalam sebuah perusahaan, lembaga maupun organisasi juga merupakan peran dari seorang Humas.

Pendekatan *Public Relations* pada saat terjadinya krisis komunikasi merupakan hal penting untuk merumuskan dan mengelola pesan yang sesuai dengan publik maupun *stakeholder*. Manajemen krisis merupakan perencanaan strategis untuk mencegah dan merespons selama terjadinya krisis, sebuah proses yang menghilangkan beberapa risiko dan ketidakpastian. Proses komunikasi krisis melibatkan interaksi verbal, visual, tertulis antara organisasi serta publiknya serta melalui pemberitaan media sebelum, selama, dan setelah kejadian negatif. Komunikasi krisis dirancang untuk meminimalkan kerusakan reputasi organisasi.

Dalam dinamika politik modern, peran *Public Relations* (PR) dalam mengelola krisis menjadi semakin penting. Manajemen krisis dalam *Public Relations* (PR) politik tidak hanya menyangkut upaya mitigasi terhadap situasi-situasi yang merugikan citra politisi atau partai politik, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana pesan-pesan politik disusun, disebarkan, dan diterima oleh masyarakat. Dalam era di mana informasi tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform digital lainnya, tantangan yang dihadapi oleh praktisi humas politik semakin kompleks. Humas harus dapat merespons dengan cepat terhadap setiap peristiwa atau kontroversi yang muncul dengan tetap mempertahankan kredibilitas dan integritas politisi atau partai yang bersangkutan.

Dalam konteks krisis manajemen pada humas politik, kasus Caleg PKS Sumedi menunjukkan pentingnya strategi manajemen krisis yang efektif dalam menghadapi situasi krisis yang tidak terduga. Krisis politik dapat datang secara tiba-tiba dan dapat mengancam stabilitas organisasi politik, sehingga manajemen krisis yang efektif menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan reputasi politik. Peran humas politik dalam menangani sebuah krisis menjadi kunci dalam merencanakan, merespons, dan memulihkan dampak dari situasi krisis. Strategi manajemen krisis yang efektif dalam politik meliputi langkah-langkah pencegahan, respon cepat, dan evaluasi pasca krisis untuk memastikan bahwa reputasi dan hubungan dengan publik tetap terjaga.

Kasus ini menarik perhatian publik karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Air merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Pemutusan aliran air oleh Sumedi Madasik dilaporkan telah menyebabkan krisis air bersih yang mengganggu kehidupan sehari-hari warga Kampung Cisuru. Tindakan ini dipandang sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan balas dendam atas kekalahan dalam pemilihan yang menimbulkan masalah serius dalam konteks hak asasi manusia dan etika politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai latar belakang dan dampak dari tindakan Sumedi Madasik. Beberapa aspek yang akan dianalisis mencakup motif tindakan tersebut, reaksi masyarakat, serta respons dari pihak berwenang. Studi ini juga akan mengeksplorasi bagaimana konflik politik di tingkat lokal dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial.

Selain itu, penelitian ini akan menilai sejauh mana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mampu menangani kasus-kasus semacam ini. Bagaimana mekanisme Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berfungsi dalam situasi dimana tindakan individu berdampak signifikan pada hak-hak dasar masyarakat akan

menjadi fokus utama. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap kebijakan lokal mengenai pengelolaan sumber daya air dan prosedur pemilihan legislatif menjadi sangat relevan.

Kasus ini juga memberikan kesempatan untuk mempelajari peran kepemimpinan dan etika dalam politik. Seorang politisi yang baik diharapkan mampu mengelola kekalahan dengan bijaksana dan tetap memprioritaskan kepentingan umum. Tindakan pemutusan aliran air oleh Sumedi Madasik mencerminkan tantangan dalam mencapai standar etika politik yang ideal dan menggarisbawahi pentingnya pendidikan politik dan etika bagi calon legislatif.

Dilansir dari laman <https://www.kompas.com> per tanggal 15 Maret 2024 dengan judul artikel “Duduk Perkara Caleg PKS Cilegon Setop Air Warga Usai Gagal Terpilih”. Melihat pada sumber tersebut dijelaskan bahwa, pada bulan Februari Sumedi Madasik memutuskan aliran air warga kampung Cisuru setelah gagal mencalonkan diri sebagai anggota legislatif kota Cilegon. Kasus ini mencuat karena masyarakat merasa kesulitan dalam mendapat air bersih setelah air ini ditutup.



Gambar 1.1 Kronologi Pemutusan Aliran Air

Sumber: <https://www.kompas.com>

Dalam kasus pemutusan aliran air oleh Sumedi Madasik kepada warga Kampung Cisuru, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai krisis karena menciptakan kondisi darurat yang mengancam kesejahteraan dan kebutuhan dasar penduduk. Pemutusan aliran air bersih menjadi titik fokus utama yang mengakibatkan ketidaknyamanan, ketidakpastian, dan dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk keperluan minum, memasak, mandi, dan sanitasi. Selain itu, krisis ini juga menciptakan ketidakstabilan sosial, meningkatkan ketegangan antara warga dengan pihak yang bertanggung jawab, serta memunculkan kekhawatiran akan kesehatan dan keamanan masyarakat akibat penurunan akses terhadap air bersih.

Situasi ini menantang PKS untuk memperbaiki citra dan kepercayaan masyarakat melalui strategi komunikasi yang efektif dan transparan. Dalam menghadapi kritik, PKS perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kepentingan publik dengan menyelaraskan kebijakan dan tindakan mereka dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, penting bagi PKS untuk memanfaatkan berbagai platform media, termasuk media sosial, untuk menyampaikan pesan positif dan klarifikasi yang akurat mengenai isu-isu yang berkembang. Dengan cara ini, PKS dapat meredakan kekhawatiran masyarakat dengan memperbaiki kesalahpahaman dan membangun kembali hubungan yang kuat. Selain itu, langkah ini akan membantu menunjukkan bahwa PKS tidak hanya beroperasi untuk kepentingan politik semata tetapi juga berkomitmen untuk melayani masyarakat secara konsisten, baik dalam situasi pemilu maupun di luar periode pemilu. Pendekatan ini akan memperkuat posisi PKS sebagai partai yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik yang nantinya dapat meningkatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas.

Pandangan negatif terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga diperparah oleh beberapa skandal politik yang melibatkan kader partai ini. Kasus pemutusan aliran air yang menyeret kader PKS akibat gagal dalam

pemilihan legislatif memberikan dampak signifikan pada citra partai di mata masyarakat. Insiden tersebut memperkuat persepsi bahwa PKS tidak mampu mengelola pemerintahan secara efektif, yang menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak opini negatif tertuju pada partai ini. Skandal seperti ini menimbulkan keraguan publik terhadap integritas dan kapabilitas PKS dalam menjalankan tugas-tugas politik dan pemerintahan.

Akibatnya, PKS sering kali dianggap berkontribusi pada krisis kepercayaan publik terhadap institusi politik dan pemerintahan, serta pada instabilitas politik yang lebih luas di Indonesia. Ketidakmampuan PKS dalam menangani skandal internal dan kontroversi politik menambah beban partai dalam upaya mereka memperbaiki citra di mata masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, PKS perlu mengadopsi pendekatan yang lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan aktivitas politik mereka, serta meningkatkan upaya komunikasi yang efektif dengan publik untuk memulihkan kepercayaan dan membangun kembali reputasi yang positif.

Dengan demikian, studi mengenai manajemen krisis dalam *Public Relation* politik menjadi sangat relevan dalam upaya memahami bagaimana strategi komunikasi politik dapat disusun untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap praktik dan teori di balik manajemen krisis dalam humas politik, diharapkan dapat ditemukan panduan-panduan praktis yang berguna bagi praktisi humas dalam menjalankan tugas mereka dengan efektif dan efisien.

Dari hal-hal yang sudah penulis jelaskan, penulis ingin menggambarkan bagaimana strategi manajemen krisis humas politik dalam menangani Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memutus aliran air warga Kampung Cisuru. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti skripsi mengenai “Strategi Manajemen Krisis Komunikasi Pada DPP PKS (Studi Pada Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang Memutus Aliran Air Warga Kampung Cisuru)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahannya sebagai berikut: “Bagaimana strategi yang dilakukan PR politik dalam menangani krisis Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memutus aliran air warga Kampung Cisuru?”

1.3 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi cakupan masalah pada aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan manajemen krisis. Adapun batasan yang diteliti sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menganalisis strategi manajemen krisis komunikasi dalam menangani Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memutus aliran air warga Kampung Cisuru.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh humas dalam menangani krisis dan memperbaiki citra partai.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat secara akademis dan praktis. Secara lebih spesifik manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan strategi manajemen krisis komunikasi dan menjadi referensi bahan penelitian di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta khususnya mahasiswa Program Studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai strategi manajemen krisis komunikasi dalam menangani

krisis Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memutus aliran air warga Kampung Cisuru.

2. Dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang membangun bagi instansi, sehingga kedepannya dapat membantu dalam penyusunan dan implementasi strategi manajemen krisis komunikasi.
3. Dapat menjadi acuan untuk perusahaan-perusahaan lain dalam mengelola strategi manajemen krisis komunikasi.

